

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara, maka dibutuhkan pembangunan. Pada September tahun 2000, mulai dijalankannya *Millennium Development Goals (MDGs)*. Deklarasi Millenium tersebut menghasilkan kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) termasuk Pemerintah Indonesia. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Millenium dan sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan (lihat Modul Pelatihan PNPM Mandiri, 2009 : 2-3).

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara, salah satunya melalui pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh negara di dunia terutama negara yang sedang berkembang. Kemiskinan dalam suatu negara di dunia banyak masalah kompleks yang dihadapi, seperti diantaranya pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu suatu negara perlu menanggulangi kemiskinan tersebut agar meningkatkan kesejahteraan dalam pembangunan manusia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin di Indonesia pada September tahun 2014 adalah 10,96%. Kemiskinan memang sudah lama terjadi di Negara Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia tentunya perlu untuk menanggulangi kemiskinan tersebut agar dapat mensejahterakan masyarakat. Dengan menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia tentunya menjadi salah satu keberhasilan pembangunan manusia, termasuk salah satunya di Provinsi Jawa Barat dengan persentase penduduk miskin pada September 2014 adalah 9,18% berdasarkan data BPS. Menurut data BPS Provinsi Jawa Barat berada urutan ke-3

dengan jumlah penduduk miskin kota dan desa sebanyak 4.238.960 jiwa setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Menurut *Human Development Report* (HDR) tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia, diantaranya untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Alat ukur yang lazim digunakan untuk memantau tingkat pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (Penyusunan Data Basis IPM Provinsi Jawa Barat, 2010-2011 : 1). IPM berguna untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, berkembang, atau terbelakang.

Demikian halnya dengan Indonesia yang menggunakan IPM untuk memantau kemajuan dari pembangunan manusia. Laporan Pembangunan Manusia 2013 yang dikeluarkan badan PBB untuk program pembangunan, yaitu UNDP, baru-baru ini memperlihatkan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang kuat dalam setiap indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam 40 tahun terakhir. Nilai IPM Indonesia pada 2012 meningkat menjadi 0,629, menjadikannya naik tiga posisi ke peringkat 121 dari peringkat 124 pada 2011 (0,624), dari 187 negara. Meski naik tiga peringkat, IPM Indonesia masih dibawah rata-rata dunia 0,694 atau regional 0,683. Indonesia dikategorikan sebagai “Negara Pembangunan Menengah” bersama 45 negara lainnya (<http://www.voaindonesia.com>).

Dimensi pengetahuan merupakan aspek penting dalam konteks pembangunan manusia. Untuk itu, selayaknya dimensi pengetahuan memperoleh perhatian serius agar dari waktu ke waktu pencapaian pengetahuan penduduk semakin meningkat. Dampaknya tentu saja kepada kemajuan pembangunan secara keseluruhan. Upaya peningkatan pengetahuan penduduk sangat dibutuhkan dalam kerangka pembangunan nasional. Tingkat pencapaian pengetahuan yang diukur melalui indikator angka melek huruf (AMH), dimana aspek tersebut merupakan komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2012, capaian dimensi pengetahuan Provinsi Jawa Barat belum optimal. Hal ini karena capaian AMH sebesar 96,39%

Novrianti Khairunnisa, 2015

PEMODELAN DATA PDRB, PENGANGGURAN, DAN AMH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT DENGAN MENGGUNAKAN MIXED GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION (MGWR)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berada pada peringkat 15, turun bila dibandingkan dengan peringkat tahun 2011 dimana peringkat AMH Jawa Barat pada tahun tersebut mencapai peringkat 12. Maka dari itu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia perlu untuk meningkatkan kemajuan pembangunan manusia agar tercapai dimensi pengetahuan yang diharapkan.

Pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembangunan ekonomi dicerminkan oleh meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB dengan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Berdasarkan data BPS di Indonesia PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013 adalah 2525342,20. Di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, seperti sebelumnya tahun 2012 adalah 2374235,51, tahun 2011 adalah 2221849,75. Demikian juga di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan untuk data BPS PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PDRB dapat dijadikan suatu indikator untuk mengetahui dan mengukur kondisi perekonomian maupun pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Konsep PDRB dapat diartikan sebagai salah satu ukuran kemajuan dalam suatu masyarakat, karena dapat mencerminkan kemampuan atau keberhasilan masyarakat dalam memperoleh pendapatan. Disamping itu PDRB juga dapat digunakan untuk dijadikan bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan, baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat umum lainnya.

Menurut Prof. Dudley Seers, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila pendapatan per kapita masyarakat meningkat, kemiskinan berkurang, tingkat

Novrianti Khairunnisa, 2015

PEMODELAN DATA PDRB, PENGANGGURAN, DAN AMH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT DENGAN MENGGUNAKAN MIXED GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION (MGWR)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengangguran berkurang, dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin mengecil. Untuk mencapai pembangunan ekonomi tersebut tentunya tingkat pengangguran harus dikurangi. Berdasarkan data BPS secara nasional terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka selama periode Februari-Agustus 2012 sebesar 2,85% yaitu dari 6,32 pada bulan Februari menjadi 6,14 pada bulan Agustus 2012. Pada Bulan Agustus 2012, Provinsi Jawa Barat menempati urutan keempat setelah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Aceh masing-masing sebesar 10,13%; 9,87%; 9,1% dan 9,08%. Oleh karena itu, sudah seharusnya menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang berada di Jawa Barat.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan pada daerah-daerah, khususnya provinsi Jawa Barat untuk pengentasan kemiskinan. Perbedaan letak geografis akan mempengaruhi potensi yang dimiliki atau digunakan oleh suatu daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pemodelan statistik dengan memperhitungkan adanya pengaruh dari keadaan geografis suatu wilayah. Model spasial yang diharapkan mampu menghasilkan model kemiskinan di setiap kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu model *Geographically Weighted Regression* (GWR). Model GWR merupakan model regresi linear lokal yang menghasilkan parameter model yang bersifat lokal untuk setiap titik atau lokasi dimana data itu dikumpulkan, sehingga akan didapatkan interpretasi yang berbeda-beda untuk setiap lokasi yang diteliti (Yasin, 2011). Akan tetapi dalam beberapa situasi, koefisien model GWR dari beberapa variabel ada yang tidak signifikan atau tidak mempunyai pengaruh lokal. Oleh karena itu, model GWR dikembangkan menjadi *Mixed Geographically Weighted Regression* (MGWR). Model MGWR merupakan gabungan dari model regresi linear dengan model GWR. Sehingga model MGWR dapat menghasilkan estimasi parameter bersifat global dan parameter lain bersifat lokal dengan lokasi observasi (Mei, C.L., dkk dalam Purhadi, 2012).

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dengan menggunakan *Mixed Geographically Weighted Regression* (MGWR) yaitu “Pemodelan MGWR Sebagai Pendekatan Model GWR yang melibatkan Parameter Global (Studi Kasus Persentase

Novrianti Khairunnisa, 2015

PEMODELAN DATA PDRB, PENGANGGURAN, DAN AMH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT DENGAN MENGGUNAKAN MIXED GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION (MGWR)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Balita Gizi Buruk di Jawa Timur Tahun 2010)” (Hanah Rista Sariyya, 2013) dan “Pemodelan *Mixed Geographically Weighted Regression* (MGWR) pada Angka Kematian Balita di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011” (Ika Febrina Wuryanti, 2013). Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pemodelan *Mixed Geographically Weighted Regression* (MGWR) dan mendapatkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari BPS Jawa Barat tahun 2012 dan Badan Pusat dan Analisa Pembangunan Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai Pemodelan Data PDRB, Pengangguran, dan AMH Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dengan Menggunakan *Mixed Geographically Weighted Regression* (MGWR).

1.2 Batasan Masalah

1. Model spasial yang hanya digunakan adalah pendekatan titik.
2. Pendekatan titik yang digunakan adalah *Mixed Geographically Weighted Regression* (MGWR).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pemodelan data PDRB, pengangguran, dan AMH terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan *Mixed Geographically Weighted Regression* (MGWR) ?
2. Bagaimanakah pengaruh data PDRB, pengangguran, dan AMH yang bersifat global ataupun lokal terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat?

1.4 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemodelan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan *Mixed Geographically Weighted Regression* (MGWR).
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh data PDRB, pengangguran, dan AMH yang bersifat global ataupun lokal terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

1.5 Manfaat Penulisan

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penulisan skripsi ini secara teoritis adalah menambah wawasan mengenai pemodelan data kemiskinan dan faktor yang mempengaruhi di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan *Mixed Geographically Weighted Regression* (MGWR).

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat penulisan skripsi ini secara praktis adalah diharapkan pembaca dapat mengetahui faktor- faktor apa sajakah yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dengan tercapainya pembangunan manusia dalam mensejahterakan rakyat yang adil dan makmur.